

KAJIAN

ISSN 1410-3249

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI



Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia - China



**Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia (Tinjauan Analisis Regional)**



**International Linkages to The Indonesian Capital Market :
Cointegration Test**



**Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong
Plastik dan Dampaknya terhadap Perekonomian**



**Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat
Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi**

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia - China; Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Analisis Regional); *International Linkages to The Indonesian Capital Market : Cointegration Test*; Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, serta Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi. Adapun para penulis yang berkontribusi pada penerbitan kali ini yaitu Ragimun, Tri Wibowo, Yoopi Abimanyu, Nur Sigit Warsidi, Sunu Kartiko, Ridiani Kurnia, Tety Mahrani, Purwoko, dan Noeroso L. Wahyudi.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, 2012
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	viii
Kumpulan Abstraksi	ix
ANALISIS PERDAGANGAN PRODUK ALAS KAKI INDONESIA - CHINA	
Oleh: Ragimun	1
KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)	
Oleh: Tri Wibowo	23
INTERNATIONAL LINKAGES TO THE INDONESIAN CAPITAL MARKET : COINTEGRATION TEST	
Oleh: Yoopi Abimanyu, Nur Sigit Warsidi, Sunu Kartiko, Ridiani Kurnia, Tety Mahrani	55
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN	
Oleh: Purwoko	77
ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI	
Oleh: Noeroso L. Wahyudi	107

DAFTAR TABEL

ANALISIS PERDAGANGAN PRODUK ALAS KAKI INDONESIA - CHINA

Tabel 2.1.	Proyeksi Produk Alas Kaki Oleh Kementerian Perindustrian	8
Tabel 3.1.	Nilai Ekspor Impor Produk Alas Kaki Indonesia China Tahun 2001-2010 (Juta US\$)	14
Tabel 3.2.	RCA, IKP dan ISP Produk Alas Kaki Indonesia	15

KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)

Tabel 3.1.	Rasio Pengeluaran 20 Persen Masyarakat Terkaya dan Termiskin	35
Tabel 3.2.	Ketimpangan di Kawasan Asean Periode 1990an dan 2000an	35
Tabel 4.1.	Propinsi dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Tinggi	43
Tabel 4.2.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2001-2011 (%) ..	45
Tabel 4.3.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Sektoral 2001-2011 (%)	46
Tabel 4.4.	Alokasi Belanja Kementerian (Rp. Triliun)	47
Tabel 4.5.	Belanja Subsidi Pertanian (Rp. Triliun)	47

INTERNATIONAL LINKAGES TO THE INDONESIAN CAPITAL MARKET : COINTEGRATION TEST

Table 2.1.	Ratio of Market Capitalization to GDP (2005 until 2007)	58
Table 3.1.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using Level Data	65
Table 3.2.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using Level Data	65
Table 3.3.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using Level Data	66
Tabel 3.4.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using First Difference Data	67
Table 3.5.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using First Difference Data	67
Table 3.6.	Result of Phillips-Perron Unit Root's Tests Using First Difference Data	68
Table 3.7.	Multivariate Johansen Cointegration Tests for JCI, KLCI, STI, PCOMP and SET	69
Table 3.8.	Multivariate Johansen Cointegration Tests for JCI, KLCI, STI and SET	70
Table 3.9.	Multivariate Johansen Cointegration Tests for JCI, INDU, NKY, HSI, KOSPI, SZCOMP, SHCOMP and TWSE	70
Table 3.10.	Multivariate Johansen cointegration tests for JCI, FTSE, DAX, CAC40 and AEX	71

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Tabel 4.1.	Data Produksi dan Prakiraan Produksi Kantong Plastik	92
Tabel 4.2.	Potensi Penerimaan Cukai atas Kantong Plastik Tahun 2012	92
Tabel 4.3.	Elastisitas Produksi Kantong Plastik	93

Tabel 4.4.	Pengaruh Pengenaan Cukai Terhadap Permintaan Akhir Kantong plastik	93
Tabel 4.5.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Output Perekonomian	94
Tabel 4.6.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Nilai Tambah Bruto	95
Tabel 4.7.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Pendapatan Masyarakat	97
Tabel 4.8.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik terhadap Pendapatan Masyarakat	98
Tabel 4.9.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik Terhadap Penerimaan Pajak Tidak Langsung	99
Tabel 4.10.	<i>Forward Linkage</i> Sektor Kantong Plastik	99
Tabel 4.11.	<i>Backward Linkage</i> Sektor Kantong Plastik	100
Tabel 4.12.	Dampak Pengenaan Cukai Kantong Plastik Terhadap Perekonomian	101

ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 5.1.	Rincian Sebaran Akad Kredit di 7 Kabupaten per 15 September 2011	116
Tabel 5.2.	Jenis Tanaman Hutan Berkayu HTR	117
Tabel 5.3.	Pemetaan Kebijakan Berdasarkan SWOT	118

DAFTAR GAMBAR

ANALISIS PERDAGANGAN PRODUK ALAS KAKI INDONESIA - CHINA

Gambar 2.1. Kurva ISP sesuai Teori Siklus Produk (<i>Product Life Cycle</i>)	10
Gambar 3.1. Komposisi Komoditas Ekspor Indonesia Tahun 2010	12

KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)

Gambar 1.1 Distribusi Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Antar Pulau di Indonesia Tahun 2012	24
Gambar 2.1 Kurva Lorenz	30
Gambar 3.1 Ketimpangan di Asean + Cina Meningkat	33
Gambar 3.2 Perbandingan Pengeluaran 20 Persen Penduduk Terkaya dan Termiskin	34
Gambar 4.1 Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan dan Ketimpangan Indonesia	36
Gambar 4.2 Ketimpangan Perekonomian Propinsi di Indonesia 2006 - 2010	38
Gambar 4.3 Typologi Klassen Perekonomian Indonesia 2006 - 2010	39
Gambar 4.4 <i>Trend</i> Kemiskinan dan Ketimpangan Pedesaan	40
Gambar 4.5 <i>Trend</i> Kemiskinan dan Ketimpangan Perkotaan	41
Gambar 4.6 Kuadran Kemiskinan dan Ketimpangan	42
Gambar 4.7 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2001-2011 (%)	44
Gambar 4.8 Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pertumbuhan PDB 2001-2011 (%)	46

INTERNATIONAL LINKAGES TO THE INDONESIAN CAPITAL MARKET : COINTEGRATION TEST

Graph 2.1 Movement of JCI (2004 until 2007)	59
Graph 3.1 Movement of JCI Relative to Other Asean Countries Indices	62
Graph 3.2 Movement of JCI Relative to Asia Pacific Countries Indices	62
Graph 3.3 Movement of JCI Relative to European Countries Indices	63

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGENAAN CUKAI ATAS PRODUK KANTONG PLASTIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN

Gambar 2.1 Model Dampak Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik Terhadap Perekonomian	83
--	----

ANALISIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Gambar 1.1. Kerangka Analisis Pengembangan Kebijakan HTR	110
Gambar 5.1. Kategori Data alokasi HTR Per April 2011	116

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Ragimun, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Perdagangan Produk Alas Kaki Indonesia - China

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 1-22

The Government continues to encourage non-oil exports in order to increase state revenues. One of them is a footwear product. Main export products are in addition to generating foreign exchange also employment. One factor that may affect the export of footwear products are competitive and many competitors' products, including China. Indonesia has the footwear of competitiveness is quite good for the world and exports of footwear products to China. From 2001 to 2010 Revealed Comparative Advantage (RCA) showed an average of over 1. Besides, the analysis of trade specialization index also shows the average above 0.5 which means that Indonesia is best suited as an exporter of footwear products. Related to this strategy of increasing competitiveness of footwear products, which need do is to continuously improve product quality and efficiency as well as footwear business climate in Indonesia.

Keyword: The competitiveness of products, specialty products, increased footwear products

Wibowo, Tri, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tinjauan Analisis Regional)

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 23 - 54

Strategy development pro-growth, pro-job, pro-poor and are listed in the RPJM 2004-2009, have shown encouraging results. During this period of economic growth increased, the unemployment rate declined, so did the level of poverty, but not so with income inequality figures. Menurunannya poverty

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI**

level has not kept pace with the inequality. Both rural and urban areas, the poverty rate showed a declining trend, but inequality has increased. National development priorities need to pay attention to regions / provinces that have high levels of poverty and high inequality and low per capita income and slow growth. This area is not a priority when development will potentially social disparities and the potential conflict that would ultimately hamper growth. Indonesia as an agricultural country, the average growth of the agricultural sector has always been below GDP growth, and the growth of a more unstable. Contribution of agriculture to GDP is also declining. The poor are mostly in the agricultural sector, and labor also largely absorbed in agriculture, should receive priority. Agricultural growth will be able to reduce the level of poverty, employment and reducing inequalities, particularly in rural Indonesia.

Keywords : Pertumbuhan, Ketimpangan, Kemiskinan, Ekonomi

Abimanyu, Yoopi, dan Tim, et. al. (Kementerian Keuangan)

International Linkages to The Indonesian Capital Market : Cointegration Test

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 55 - 76

This paper explores the international linkages of the Indonesian capital market using cointegration tests to examine the long-run equilibrium relationship between the stock markets of Indonesia with China, France, Germany, Hong Kong, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Philippine, Singapore, Thailand, Taiwan, the United Kingdom, and the United States. The method used in this paper is visual inspection, followed by Johansen cointegration. Our results show that there exist cointegration between these stock market indices except between Indonesia and Philippine.

Keywords: Capital Market, Cointegration Test, Stock, Market

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012**

Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.

ABSTRAKSI

Purwoko, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Efektivitas Pengenaan Cukai atas Produk Kantong Plastik dan Dampaknya Terhadap Perekonomian

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 77 – 106

Karena sifatnya yang kuat menahan beban, harganya yang murah, dan bisa digunakan sebagai sarana promosi yang efektif, penggunaan kantong plastik di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Banyak supermarket, toko, dan warung yang memberikan kantong plastik untuk membungkus barang belanjaan secara gratis. Akibatnya, sampah kantong plastik bisa dijumpai di mana-mana. Masalahnya, sampah kantong memerlukan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai dengan sempurna, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan penghancuran sampah kantong plastik. Apabila tidak dibatasi penggunaannya, dikhawatirkan akan mengganggu upaya pelestarian lingkungan.

Pengenaan cukai atas produk kantong plastik merupakan salah satu upaya untuk mengurangi laju pertumbuhan penggunaan kantong plastik. Kajian ini menganalisis efektivitas pengenaan cukai atas produk kantong plastik serta dampaknya terhadap perekonomian. Analisis dilakukan dengan menggunakan elastisitas untuk melihat sejauh mana kebijakan pengenaan cukai dapat mengurangi laju penggunaan kantong plastik serta model Input-output untuk melihat dampak ekonomi dari kebijakan pengenaan cukai atas produk tersebut.

Kata kunci: kantong plastik, pelestarian lingkungan, cukai, dampak ekonomi, input - output

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012*****Keywords used are free terms. Abstracts can be reproduced without permission or charge.*****ABSTRAKSI****L. Wahyudi, Noeroso, et. al. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)****Analisis Pengembangan Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi****Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 16 Nomor 2 Tahun 2012, halaman 107 – 126**

Tulisan Ilmiah ini menyajikan kerangka analisis untuk menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan peran Hutan Tanaman Rakyat atau HTR dalam mengembangkan kapasitas domestik, Kerangka Analisis ini menyajikan analisis SWOT berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang mengeksplorasi perkembangan kebijakan, sumber pembiayaan dan perkembangan HTR.

Tujuan utama penelitian ini adalah menformulasikan konsep kebijakan pembiayaan yang inovatif dengan menganalisis posisi strategi pengembangan kebijakan. Konsep ini merupakan pilihan kebijakan berdasarkan implikasi strategi antara lain: i) menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam memanfaatkan peluang, dan ii) strategi menggunakan kekuatan dan kelemahan dalam mengatasi ancaman.

Peluang yang harus dimanfaatkan untuk pengembangan HTR adalah kelangkaan pasokan kayu dari hutan primer, dan komitmen pemerintah untuk mendukung HTR. Sementara identifikasi faktor eksternal kekuatan antara lain-lainnya kawasan hutan yang terdegradasi untuk menjadi areal HTR, banyaknya UMKM yang berdomisili disekitarnya. Sedangkan strategi yang harus dilaksanakan antara lain: i) mempercepat pembangunan HTR dengan membuka kendala yakni perijinan dan pembiayaan HTR.

Kata Kunci : HTR, Pertumbuhan Ekonomi, Insentif Fiskal, REDD

KEMISKINAN, KETIMPANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS REGIONAL)

Oleh :
Tri Wibowo¹

Abstract

Strategy development pro-growth, pro-job, pro-poor and are listed in the RPJM 2004-2009, have shown encouraging results. During this period of economic growth increased, the unemployment rate declined, so did the level of poverty, but not so with income inequality figures. Menurunannya poverty level has not kept pace with the inequality. Both rural and urban areas, the poverty rate showed a declining trend, but inequality has increased. National development priorities need to pay attention to regions / provinces that have high levels of poverty and high inequality and low per capita income and slow growth. This area is not a priority when development will potentially social disparities and the potential conflict that would ultimately hamper growth. Indonesia as an agricultural country, the average growth of the agricultural sector has always been below GDP growth, and the growth of a more unstable. Contribution of agriculture to GDP is also declining. The poor are mostly in the agricultural sector, and labor also largely absorbed in agriculture, should receive priority. Agricultural growth will be able to reduce the level of poverty, employment and reducing inequalities, particularly in rural Indonesia.

Keywords : Pertumbuhan, Ketimpangan, Kemiskinan, Ekonomi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah ditetapkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu *pro growth*, *pro job* dan *pro poor*. Melalui strategi *pro growth*, terjadi percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Percepatan laju pertumbuhan ini ditandai dengan makin banyaknya kesempatan kerja tercipta sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan

¹ Tri Wibowo, Peneliti Madya pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
Email : 3wibowo@gmail.com

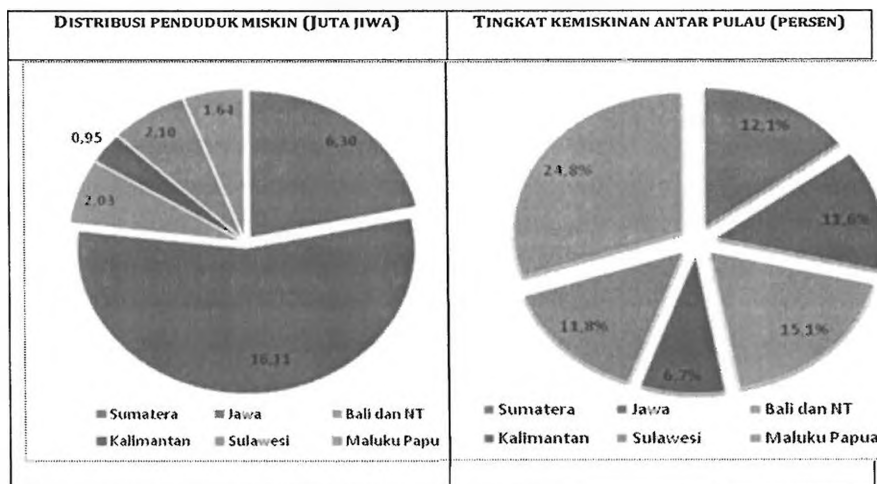
dari perangkat kemiskinan, serta memperkuat perekonomian untuk menghadapi berbagai guncangan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*, telah memberikan arah pembangunan yang benar dan hasil yang diinginkan.

Strategi pembangunan *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*, telah menunjukan hasil yang menggembirakan. Selama kurun waktu 2004 – 2009, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, demikian pula tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, baik dari jumlah orang miskin maupun tingkat kemiskinannya.

Sampai dengan Maret 2012, tingkat kemiskinan telah turun menjadi 11,96 persen (29,13 juta jiwa). Sebelumnya, sampai dengan Maret 2011, tingkat kemiskinan nasional menurun hingga 12,49 persen, dari 13,33 persen pada tahun 2010. Selanjutnya, pada periode September 2011, tingkat kemiskinan menurun lagi menjadi 12,36 persen. Diharapkan tingkat kemiskinan nasional akan dapat diturunkan lagi pada kisaran 9,5-10,5 persen pada tahun 2013.

Dilihat dari distribusinya, penduduk miskin di Indonesia tersebar tidak merata. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2012 sebesar 29,13 juta jiwa (11,96 persen) sebagian besar masih tertumpu di pulau Jawa. Sebesar 16,1 juta jiwa (11,6 persen) penduduk miskin di Indonesia berada di pulau Jawa, pulau Sumatera sebesar 6,3 juta jiwa (121 persen), pulau Sulawesi sebesar 2,1 juta jiwa (11,8 persen), Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Tenggara sebesar 2,03 juta jiwa (15,1 persen), Maluku dan Papua sebesar 1,64 juta jiwa (24,8 persen), dan pulau Kalimantan sebesar 0,95 juta jiwa (6,7 persen).

Gambar 1.1
Distribusi Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Antar Pulau
di Indonesia Tahun 2012



Sumber : BPS

Ditengah suksesnya kinerja pemerintah dalam menjalankan strategi pembangunan tersebut, terdapat beberapa kritik bahwa suksesnya kinerja tersebut masih menyisakan pekerjaan besar yakni terjadinya ketimpangan yang semakin lebar. Membaiknya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya tingkat pengangguran dan menurunnya tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun belum mampu menyelesaikan permasalahan ketimpangan yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Pendapatan masyarakat belum terdistribusi secara merata. Golongan masyarakat berpendapatan rendah belum mampu merasakan suksesnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, kondisi ini tidak saja dialami oleh Indonesia, Negara kawasan Asia juga mengalami kondisi yang tidak jauh berbeda. Indonesia dengan penduduk hampir mencapai 250 juta, merupakan Negara kepulauan, dan sedang mengalami masa peralihan kedalam kelompok negara *middle income*, mempunyai permasalahan yang lebih komplek. Sharma (2011) menyatakan bahwa di negara-negara di Asia timur dan Asia pasifik telah mengalami berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan namun terjadi ketimpangan yang semakin lebar. Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan telah mengalami peningkatan. Ketimpangan di Cina sebesar 48,2 persen Filipina sebesar 45 persen dan Thailand sebesar 40 persen.

Tidak bisa dipungkiri, kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tingkat nasional, merupakan agregasi dari kemiskinan, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat regional/propinsi. Oleh karena itu, analisis pada level propinsi sangat dibutuhkan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada tingkat nasional.

Kemiskinan, ketimpangan pendapatan antar wilayah/propinsi apabila terus berlanjut, akan berimbas pada munculnya berbagai permasalahan baik sosial maupun ekonomim. Adanya konflik tersebut pada akhirnya akan menjadi penghambat pembangunan ekonomi daerah, yang akhirnya berdampak pada pembangunan nasional secara umum. Diperlukan analisis tingkat wilayah/propinsi agar kemiskinan dan ketimpangan nasional dapat teridentifikasi dengan jelas.

1.2. Permasalahan

Penulisan artikel ini bertujuan :

1. Bagaimana kondisi kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia ?
2. Apakah terdapat keterkaitan kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia ?
3. Alternatif kebijakan dalam mengurangi jurang ketimpangan antar propinsi di Indonesia.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan artikel ini bertujuan :

1. Mengetahui bagaimana potret kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi antar propinsi di Indonesia
2. Mengetahui bagaimana keterkaitan antara kemiskinan, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Mencarai alternative solusi kebijakan dalam mengurangi jurang ketimpangan antar propinsi di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah metode diskriptif dan kuantitatif. Metode diskriptif digunakan untuk memaparkan hubungan dari variable yang diteliti dengan menggunakan grafis, diagram kartesius, dan analisis typology Klassen. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti, analisis yang digunakan adalah Povcallnet dari Worldbank, serta regresi linier untuk analisis trend selama periode pengamatan. Periode pengamatan adalah dari tahun 2004 – 2010 pada 33 propinsi di Indonesia. Sumber data dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur lain yang mendukung.

Konsepsi pengukuran variabel adalah sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, adalah tingkat kemiskinan propinsi (persen)
- b. Pertumbuhan ekonomi, adalah pertumbuhan ekonomi propinsi (persen)
- c. Ketimpangan pendapatan, adalah ketimpangan pendapatan masyarakat dalam satu propinsi yang diukur dengan nilai koefisien *Gini Ratio* (persen)
- d. Ketimpangan perekonomian regional, adalah ketimpangan perekonomian antara kabupaten/kota dalam satu propinsi, yang diukur dengan Indeks Williamson (persen)

II. STUDI PUSTAKA

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Arsyad (2004) mengelompokan ukuran kemiskinan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka seseorang dapat dikategorikan miskin. Sedangkan kemiskinan relatif Kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada keadaan orang yang bersangkutan.

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “tidak miskin”. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin (Miller, 1971; dalam Arsyad (2004).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2007), mendefinisikan kemiskinan ke dalam beberapa terminologi seperti, kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Biasanya kemiskinan relatif ini difokuskan kepada distribusi pendapatan. Dalam menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan.

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai kebutuhan pokok minimum. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Garis kemiskinan absolut ini berguna dalam menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan yaitu US \$ 1 per hari atau US \$ 2 per hari.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur atau tatanan kehidupan yang tidak menguntungkan. Yang dimaksud tidak menguntungkan di sini karena tatanan sosial yang tidak adil sehingga melanggengkan kemiskinan. Tatanan kehidupan ini yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya. Sedangkan Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ini sebenarnya bisa dikurangi dan dihilangkan secara bertahap dengan mengabaikan adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik.

Bank Dunia menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluaran konsumsi yang di konversi ke dalam US\$ PPP (*Purchasing power parity/paritas daya beli*), bukan nilai tukar US\$ resmi. Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (Dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah

kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang sama tersebut dapat dibeli seharga US\$1 di Amerika. Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kualitas di masing-masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank dunia, yaitu : a) US\$ 1 PPP Perkapita per hari ; b) US\$ 2 PPP Perkapita perhari . Ukuran tersebut direvisi menjadi US\$ 1,25 PPP dan US\$ 2 PPP per kapita per hari.

Pendapatan per kapita yang tinggi sama sekali bukan merupakan jaminan tidak adanya kemiskinan absolut dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat besar atau kecilnya porsi atau bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok-kelompok penduduk yang paling miskin tidak sama untuk masing-masing negara, sehingga mungkin saja suatu negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi justru mempunyai presentase penduduk yang berbeda di bawah garis kemiskinan internasional yang lebih besar dibandingkan dengan suatu negara yang pendapatan per kapitanya lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut antara lain struktur pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di negara yang bersangkutan, berbagai pengaturan politik dan kelembagaan yang dalam prakteknya ikut menentukan pola-pola distribusi pendapatan nasional (BPS, 2012).

Kemiskinan dihitung dengan menggunakan rumus :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

α = 0

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS, 2012) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan

(GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.

2.2. Ketimpangan

2.2.1. Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga yang bersumber dari Susenas sebagai proksi pendapatan. Beberapa ukuran yang biasa digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*).

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. ini menghasilkan kurva Lorenz. Semakin lebar kurva, menunjukkan ketimpangan semakin besar.

Ketimpangan pendapatan dihitung dengan menggunakan koefisien Gini ratio (ratio luas daerah A, dibagi luas daerah A + B), yang dirumus secara matematis dengan:

$$Gini = 1 - \sum_{i=1}^N (x_i - x_{i-1})(y_i + y_{i-1}).$$

Ketika N masing-masing interval adalah sama, maka rumus diatas disederhanakan menjadi :

$$Gini = 1 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i-1}).$$

Dimana :

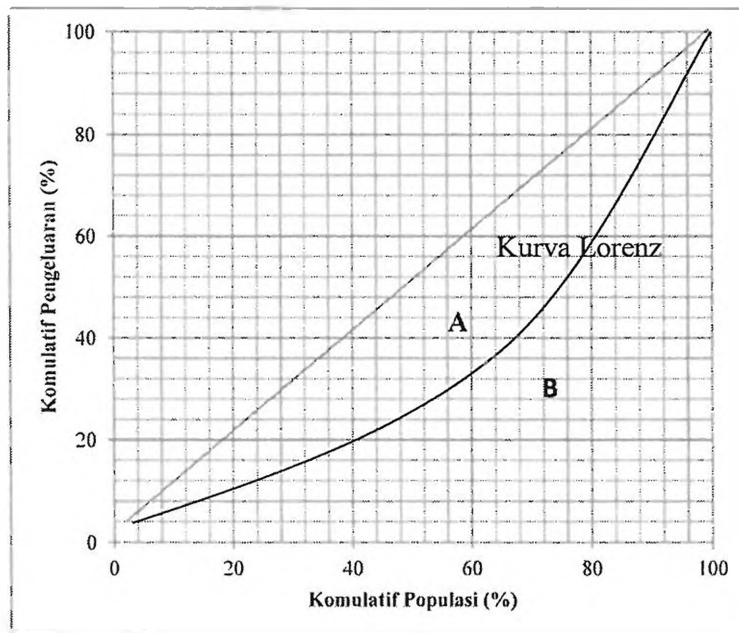
G = Rasio Gini

f_i = Proporsi Jumlah Rumah Tangga dalam kelas t

X_i = Proporsi Jumlah Komulatif Rumah Tangga dalam kelas t

Y_i = Proporsi Jumlah Komulatif Pendapatan dalam kelas t

Gambar 2.1.
Kurva Lorenz



Nilai koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat, dan nilainya diantara 0 (pemerataan sempurna) dan 1 (ketimpangan/ketidakmerataan sempurna). Ketimpangan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketimpangan sedang berkisar 0,36 – 0,49; dan ketimpangan rendah berkisar antara 0,20 – 0,35 (Arsyad, 2004).

2.2.2. Ketimpangan Perekonomian

Analisis ketimpangan ekonomi antar daerah yang paling umum digunakan adalah analisis Indeks Ketimpangan Williamson yakni analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) dengan rumus perhitungan sebagai berikut (Syafrihal, 1997):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Dimana:

Y_i = PDRB per kapita provinsi i

Y = PDRB per kapita rata-rata nasional

f_i = jumlah penduduk di provinsi i

n = jumlah penduduk nasional

Dengan indikator bahwa apabila angka indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 sampai dengan 1, jika mendekati 0 berarti ketimpangan (disparitas) pendapatan antar provinsi di Indonesia semakin rendah atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi regional terjadi secara merata, tetapi jika bila angka indeks menunjukkan semakin jauh dari nol atau mendekati 1 maka disparitas pendapatan provinsi di Indonesia semakin tinggi serta mengidentifikasi adanya pertumbuhan ekonomi regional yang tidak merata.

2.3. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pertumbuhan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelolaberbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Disini, proses mendapat penekanan karena mengandung unsur dinamis (Arsyad, 2004).

Disparitas antar daerah tidak dapat dihindari akibat tidak terjadinya efek perembesan ke bawah (*trickle down effect*) dari output secara nasional terhadap masyarakat mayoritas bahkan sampai saat sekarang (reformasi). Kenikmatan hasil output nasional hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas. Angka kemiskinan absolut justru meningkat karena semakin lebarnya jurang perbedaan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Disparitas pendapatan antar daerah merupakan topik yang perlu dikaji dengan memperhitungkan beberapa alasan. Dasar utama menariknya hal ini untuk diteliti karena disparitas merupakan suatu hal yang dapat menghambat pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Ravallion (2005), melihat pengalaman dari 70 negara berkembang dan transisi pada 1990-an, menemukan ada tanda-tanda terjadinya *trade-off* yang sistematis antara kemiskinan dan ketimpangan. Argumen teoritis klasik yang percaya terjadi *trade-off* antara kemiskinan dan ketimpangan di negara berkembang didasarkan pada Hipotesis Kuznets (teori Kuznets). Hubungan antara ketimpangan (sumbu vertikal) dengan pendapatan (sumbu horisontal), pada saat awal pertumbuhan, ketimpangan akan mengalami peningkatan; mencapai titik balik, dan kemudian mengalami penurunan sehingga menyerupai huruf U terbalik.

Sedangkan Tulus (2006) menyatakan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan mempunyai hubungan yang khas. Bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di tingkat dunia adalah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar pendapatan per kapita dan semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Namun, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai hubungan yang tidak mudah untuk dijelaskan dan menimbulkan kontroversi. Kemiskinan selain dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan, juga oleh pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi. Secara umum pertumbuhan ekonomi (peningkatan output) akan meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan upah, yang selanjutnya akan mengurangi kemiskinan.

Elastisitas ketidakmerataan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan pendapatan adalah komponen kunci dari perbedaan ketimpangan konstan dan efek perubahan ketimpangan dari pertumbuhan pendapatan terhadap kemiskinan Wodon (1999)

Menurut Simon Kuznets (dalam Ravallion, 2005) terdapat korelasi positif atau negatif dalam jangka panjang antara tingkat pendapatan per kapita dengan tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan distribusi pendapatan naik sebagai akibat proses urbanisasi dan industrialisasi. Ketimpangan menurun karena sektor industri di kota sudah menyerap tenaga kerja dari desa atau produksi atau penciptaan pendapatan dari pertanian lebih kecil. Hubungan tersebut memberikan arti bahwa terjadi evolusi distribusi pendapatan dalam proses transisi dari ekonomi pedesaan (pertanian) ke ekonomi perkotaan (industri).

III. PERTUMBUHAN DAN KETIMPANGAN DI KAWASAN ASIA

Ditengah melemahnya perekonomian global sebagai akibat krisis di kawasan eropa, perekonomian di kawasan Asia pada tahun 2012 diperkirakan masih mampu tumbuh sebesar 7,3 persen, setelah tahun 2011 tumbuh sebesar 7,8 persen. Pada tahun 2013 perekonomian Asia diperkirakan kembali tumbuh menjadi sebesar 7,9 persen. Cina, India dan Asean + 5 masih sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Asia. Diperkirakan pada tahun 2013 ekonomi Cina mampu tumbuh sebesar 8,8 persen, India sebesar 7,3 persen) dan Asean + 5 tumbuh sebesar 6,2 persen (WEO, 2012).

ADB (2012) ² melaporkan, meskipun pertumbuhan di kawasan Asia cukup tinggi dan mampu mengurangi kemiskinan, namun negara-negara di kawasan Asia

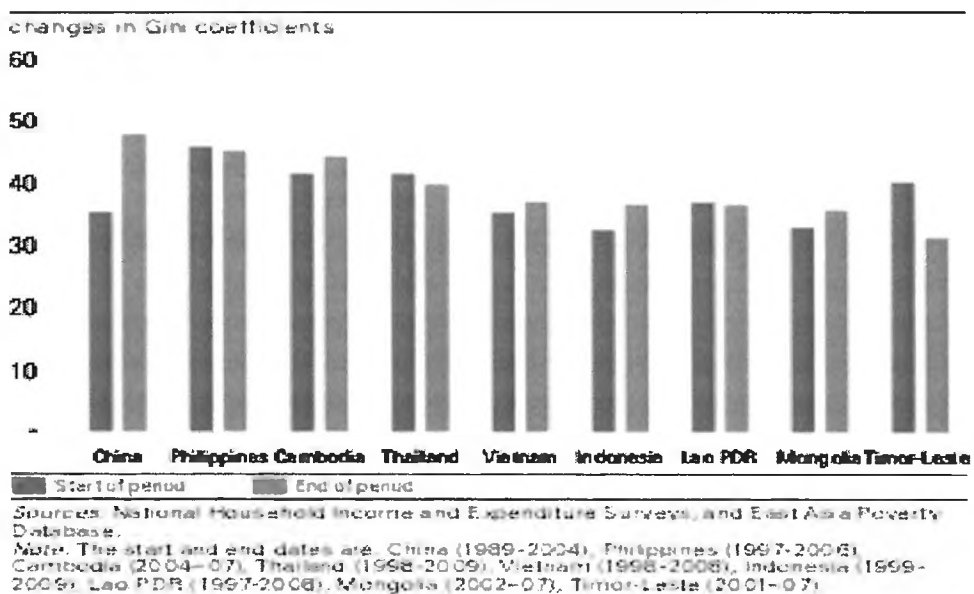
² ADB, 2012, Outlook 2012, Confronting Rising Inequality in Asia

belum mampu mengatasi ketimpangan. Perbandingan ketimpangan antara periode tahun 1990an dengan periode tahun 2000an mengalami ketimpangan yang semakin lebar. Koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan di Cina pada periode 1990 an sebesar 32 persen, menjadi 43 persen pada periode 2000an. India dari 33 persen, menjadi 37 persen. Demikian pula Indonesia, dari 29 persen mejadi 39 persen pada periode yang sama.

Tingginya ketimpangan pada negara-negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kesenjangan dan berdampak pada kerawanan sosial. Tingginya angka kriminalitas, tuntutan kenaikan upah buruh, kecemburuan antara kaya dan miskin, serta permasalahan sosial lainnya yang akan menyebabkan iklim investasi menjadi kurang kondusif. Iklim investasi yang kurang kondusif tersebut akan permerlemah investasi yang pada akhirnya akan mengganggu proses pertumbuhan ekonomi (Sharma, 2001).

Dalam laporan tersebut (Sharma, 2011), ketimpangan meningkat secara dramatis terjadi tidak hanya di Cina, tetapi juga terjadi di kawasan Asean seperti Indonesia, Mongolia, Vietnam, dan kamboja. Nilai koefisien Gini sebagai ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat di Cina mencapai 48,2 persen, Philipina 45 persen, dan Thailand 40 persen.

Gambar 3.1.
Ketimpangan di Asean + Cina Meningkat

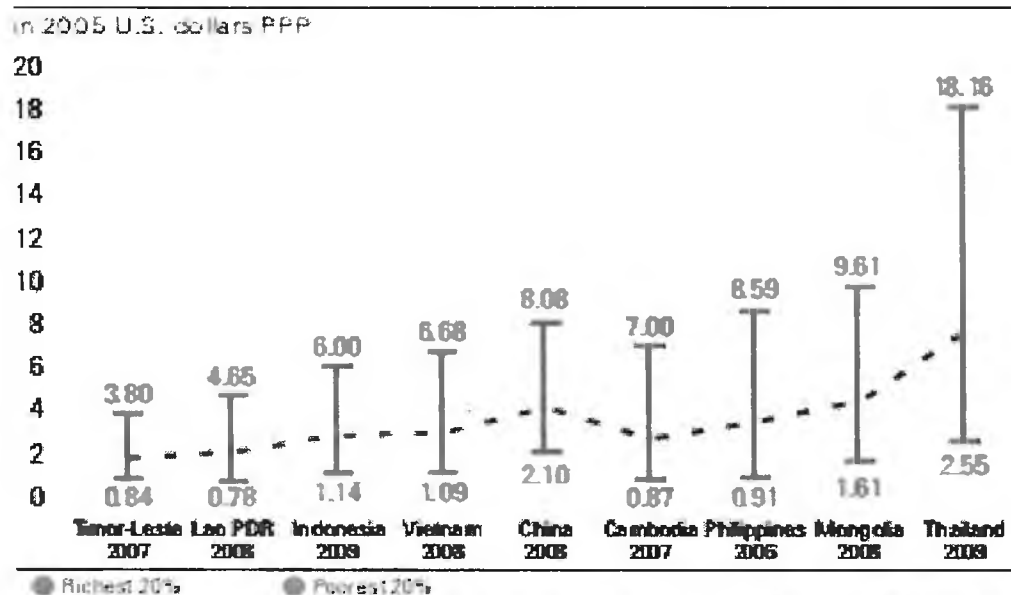


Sumber : Sharma, 2011

Lebih lanjut Sharma (2011) melihat perbedaan antara 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi dengan 20 persen penduduk berpendapatan terendah. Analisis dilakukan pada periode bervariasi antara tahun 2006 – 2009 dengan melihat potret pada kondisi satu tahun. Dengan menggunakan PPP 2005, 20 persen penduduk terkaya Philipina pengeluarannya 9 kali lipat dibandingkan dengan 20 persen pengeluaran penduduk termiskin. Kamboja 8 kali lipat dan Thailand sebesar 7 kali lipat.

Dalam rentang periode tersebut, Indonesia mempunyai rasio yang paling kecil di kawasan Asean. Rata-rata Pengeluaran 20 persen penduduk terkaya Indonesia sebesar 6 U\$ PPP, sementara itu rata-rata pengeluaran 20 persen penduduk termiskin sebesar 1.14 U\$ PPP, sehingga rasio pengeluaran 20 persen penduduk terkaya terhadap 20 persen penduduk termiskin sebesar 5 kali lipat.

Gambar 3.2.
Perbandingan Pengeluaran 20 Persen Penduduk Terkaya dan Termiskin



Sources: Various Household Income and Expenditure Surveys, and East Asia Regional Poverty Monitoring Database

Tabel 3.1.
Rasio Pengeluaran 20 Persen Masyarakat Terkaya dan Termiskin

Negara	Terkaya (U\$ PPP)	Termiskin) (U\$ PPP)	Rasio
Laos	4,65	0,78	6,0
Indonesia	6,00	1,14	5,3
Vietnam	6,68	1,09	6,1
Camboja	7,00	0,87	8,0
Philipina	8,59	0,91	9,4
Thailand	18,16	2,55	7,1
Rata-rata	8,51	1,22	6,9

Sumber : Sharma (2011) diolah

Sementara itu, hasil laporan dari ADB (2012) dengan membandingkan antara periode tahun 1990an dengan periode tahun 2000an diperoleh hasil bahwa pertumbuhan ketimpangan yang dilihat dari nilai *Gini Ratio* di Indonesia menempati urutan paling atas di kawasan Asean. Pada periode tahun 1990an ketimpangan di Indonesia paling rendah d kawasan Asean dengan koefisien Gini sebesar 29,2 sebesar 29,2 persen, naik menjadi 38,9 persen pada periode tahun 2000an.

Kenaikan ketimpangan Indonesia menempati urutan terbesar di kawasan Asean. Setiap tahun ketimpangan Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen. Sementara itu, Malaysia, Philipina, Thailand dan kamboja menunjukkan trend ketimpangan yang semaki menurun. Demikian juga rasio 20 persen penduduk terkaya terhadap penduduk termiskin. Pada periode 1990an *rationya* sebesar 4,1, naik menjadi 6,6 pada periode 2000an.

Tabel 3.2.
Ketimpangan di Kawasan Asean Periode 1990an dan 2000an

Negara	Koefisien Gini		Pertumbuhan per tahun (%)	Rasio 20% Terkaya dan 20% Termiskin	
	1990an	2000an		1990an	2000an
Cambodia	38.3	37.9	-0.1	5.8	6.1
Indonesia	29.2	38.9	1.4	4.1	6.6
Laos	30.4	36.7	1.2	4.3	5.9
Malaysia	47.7	46.2	-0.2	11.4	11.3
Philippines	43.8	43	-0.1	8.6	8.3
Thailand	45.3	40	-0.6	8.8	7.1
Vietnam	35.7	35.6	0	5.6	5.9

Sumber : ADB 2012 (diringkas)

Pada periode tahun 1990an ketimpangan di Indonesia paling rendah d kawasan Asean dengan koefisien Gini sebesar 29,2sebesar 29,2 persen, naik menjadi 38,9 persen pada periode tahun 2000an. Pertumbuhan per tahun ketimpangan Indonesia menempati urutan terbesar. Setiap tahun ketimpangan Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen. Sementara itu, Malaysia, Philipina, Thailand dan kamboja menunjukkan trend ketimpangan yang semakin menurun.

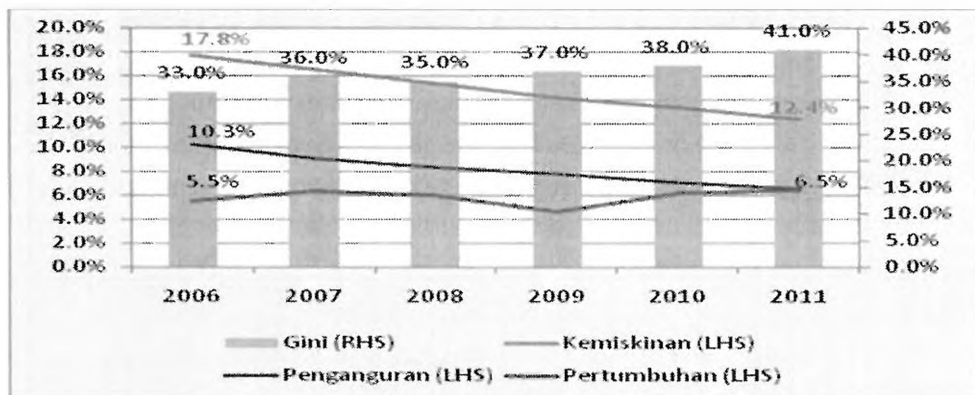
IV. ANALISIS KETIMPANGAN DI INDONESIA

4.1. Strategi Pembangunan *Pro Growth, Pro Job, Pro Poor*

Stategi pembangunan *pro growth, pro jobs, dan pro poor*, sebagaimana telah dituangkan dalam RPJM 2004-2009 telah menunjukan hasil yang menggembirakan. Selama kurun waktu 2004 – 2009, pertumbuhan ekonomi meningkat, angka pengangguran menurun, demikian pula tingkat kemiskinan. Kemiskinan pada tahun 2006 sebesar 17,8 persen (39,05 juta jiwa) terus mengalami penurunan dan turun menjadi 12,4 persen (30,02 juta jiwa) pada tahun 2011.

Demikian pula tingkat pengangguran. Pada tahun 2006 tingkat pengangguran sebesar 10,3 persen terus mengalami penurunan dan turun menjadi 6,6 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terus menunjukkan pergerakan yang positif. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5 persen. Bahkan ditengah krisis perekonomian global pada tahun 2009 perekoomian Indonesia masih mampu tumbuh sebesar 4,6 persen. Pada tahun 2011 ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 6,5 persen.

Gambar 4.1.
Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan dan Ketimpangan Indonesia



Sumber : BPS

Walaupun angka pertumbuhan mengalami peningkatan, angka kemiskinan menurun dan angka pengangguran juga mengalami penurunan, namun angka ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 ketimpangan di Indonesia sebesar 33 persen, naik menjadi 41 persen pada tahun 2011.

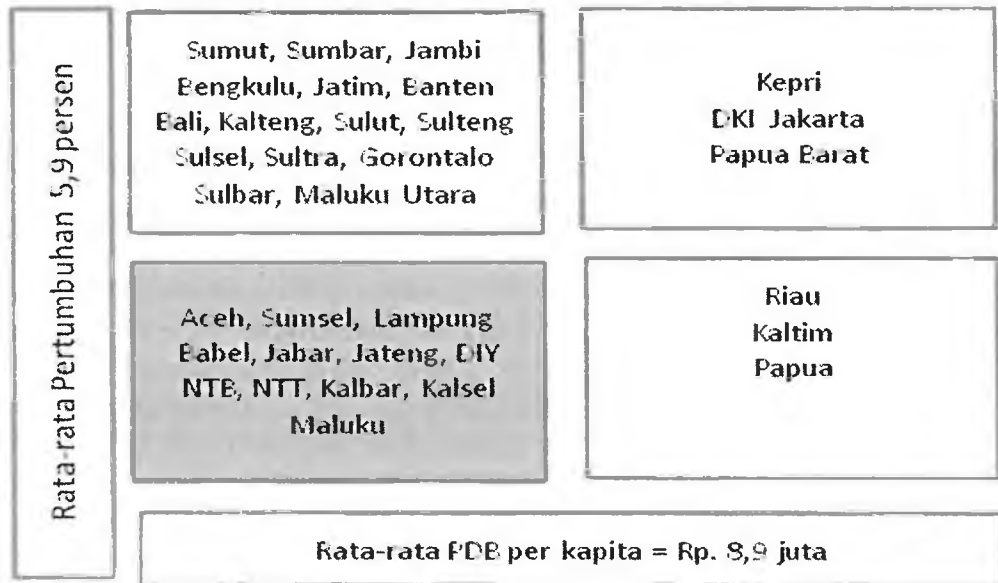
Dari Gambar 4.1. diatas, selama periode 2006 sampai dengan 2011 trend kemiskinan menurun sebesar -1,1 persen per tahun, tingkat pengangguran menurun sebesar - 0,7 persen per tahun, pertumbuhan meningkat 0,1 persen. Namun ditengah prestasi tersebut, tingkat ketimpangan semakin melebar. Koefisien Glni rasio sebagai ukuran ketimpangan, setiap tahun naik sebesar 1,4 persen. Terjadi *trade off* antara tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, dengan ketimpangan di Indonesia. Pertumbuhan mengalami kenaikan, kemiskinan menurun, namun ketimpangan semakin melebar.

4.2. Ketimpangan Perekonomian Regional

Ketimpangan perekonomian regional yang diukur dengan Indeks Wiliamson (IW) yang merupakan ukuran sejauhmana ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota dalam suatu propinsi. Nilai 0 menunjukkan tidak terjadi ketimpangan, nilai 1 menunjukkan sangat timpang.

Ketimpangan terbesar pada periode 2006 sampai dengan 2010 terbesar terjadi pada Propinsi Jatim dan Propinsi Kaltim. Kedua propinsi ini ketimpangannya melampaui 1, dan dapat dikatakan sangat timpang. Ketimpangan perekonomian di Propinsi Jatim selama periode 2006 - 2010 mencapai 1,1. Ketimpangan ini diakibatkan pendapatan tingginya pendapatan per kapita di Kota Kediri karena adanya pabrik rokok (Rp. 82 juta/org/tahun) dan Kota Surabaya sebagai ibukota propinsi (Rp. 32 juta juta/org/tahun). Sementara itu, rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten/Kota di Jawa Timur hanya mencapai Rp. 9,3 juta /org/tahun. Sementara itu, ketimpangan di Propinsi Kalimantan Timur pada periode yang sama mencapai 1,02. Ketimpangan ini diakibatkan tingginya pendapatan per kapita Kabupaten Bontang sebagai Kabupaten penghasil minyak yang mencapai Rp. 163 juta /org/tahun, jauh melampaui rata-rata pendapatan per kapita Kabupaten/Kota di Propinsi Kaltim yang besarnya mencapai Rp. 32,6 juta/org/tahun.

Gambar 4.3.
Typologi Klassen Perekonomian Indonesia 2006 - 2010



Sumber : Hasil Analisis

4.4. Kemiskinan dan Ketimpangan

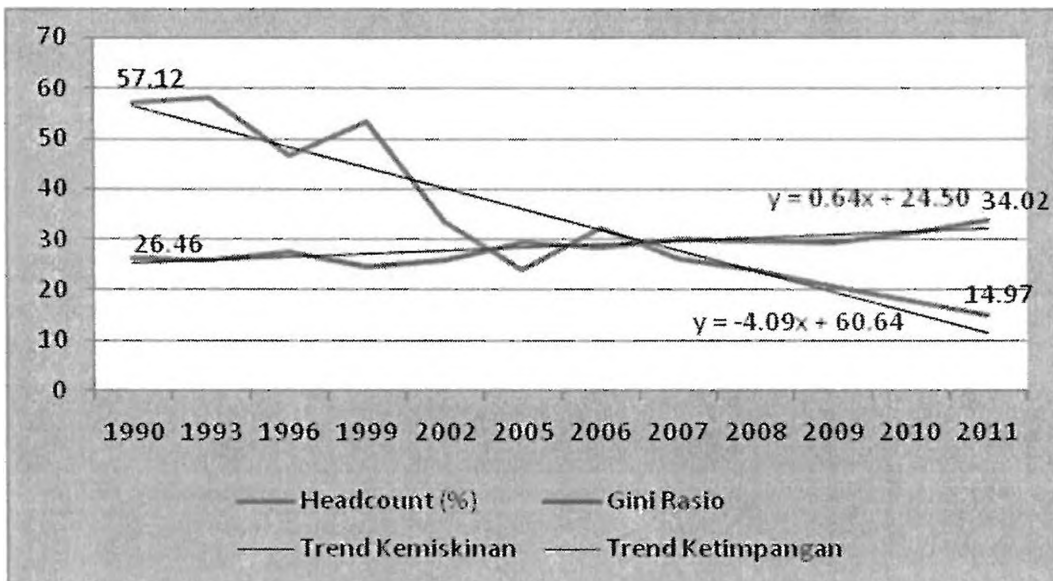
4.4.1. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

Analisis dengan PovcalNet³ dari Bank Dunia digunakan untuk menghitung kemiskinan dan ketimpangan berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam menghitung garis kemiskinan (*poverty line*), Bank dunia menggunakan US\$ PPP (*Purchasing power parity/paritas daya beli*), bukan nilai tukar US\$ resmi, agar tingkat kemiskinan berbagai negara bisa dibandingkan.

Dengan metode analisis tersebut, kemiskinan dan ketimpangan Indonesia dengan menggunakan data periode tahun 1990 sampai dengan tahun 2011 diperoleh hasil bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan relatif lebih baik dibandingkan daerah perkotaan. Walaupun ketimpangan di daerah pedesaan lebih rendah, namun mempunyai laju ketimpangan yang lebih cepat, tiap tahun ketimpangan di pedesaan naik sebesar 0,64 persen. Dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar 1,25 US\$ PPP/hari, diperoleh hasil yang disajikan pada Gambar 4.4. dan Gambar 4.5. berikut.

³ PovcalNet (<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm> diakses tanggal : 12 Mei 2012)

Gambar 4.4.
Trend Kemiskinan dan Ketimpangan Pedesaan

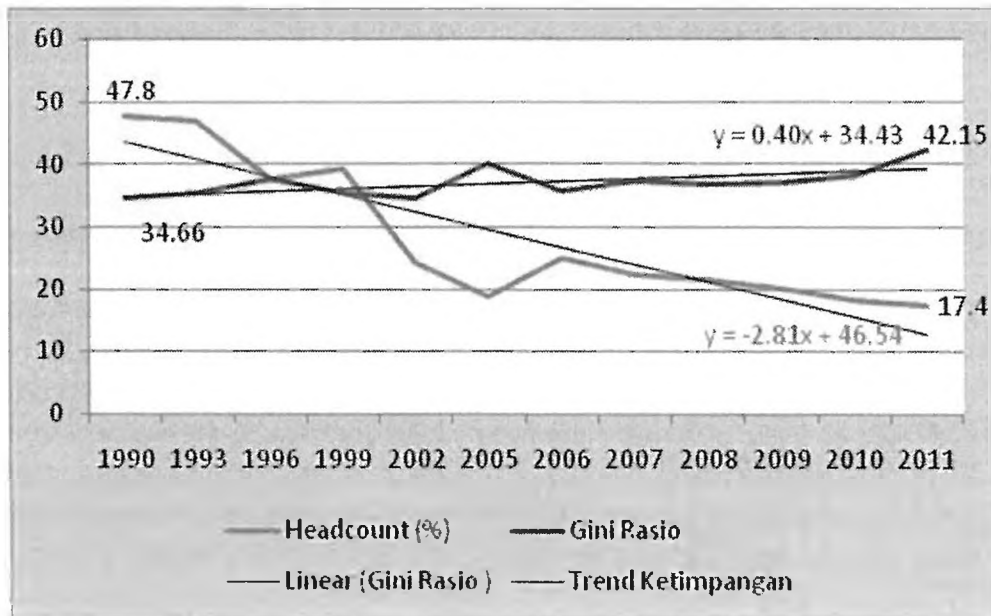


Sumber: Hasil Analisis dengan PovcalNet

Pada tahun 1990, tingkat kemiskinan di pedesaan di Indonesia sebesar 57,12 persen, turun menjadi 14,97 persen pada tahun 2011. Laju penurunan ini tingkat kemiskinan di pedesaan cukup tinggi. Hasil persamaan regresi linier untuk mengetahui trend penurunan kemiskinan diperoleh persamaan : $Y = 60,64 - 4,09X$, yang dapat diartikan bahwa setiap tahun tingkat kemiskinan di pedesaan menurun sebesar -4,09 persen. Dengan mengikuti trend tersebut, tingkat kemiskinan di pedesaan pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 11 persen, tahun 2013 sebesar 7 persen, dan tahun 2014 sebesar 3 persen.

Namun demikian, kondisi penurunan tingkat kemiskinan tersebut belum mampu diimbangi dengan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan pedesaan di Indonesia (diukur dengan koefisien Gini rasio) pada tahun 1990 sebesar 26,5 persen, naik menjadi 34,0 persen pada tahun 2011. Dari analisis trend diperoleh persamaan : $Y = 24,50 + 0,64 X$. Persamaan ini memberikan arti bahwa setiap tahun ketimpangan di pedesaan bertambah sebesar 0,64 persen. Apabila kedua persamaan kemiskinan dan ketimpangan tersebut digabung, akan diperoleh elastisitas kemiskinan terhadap ketimpangan sebesar - 0,16 persen. Setiap penurunan kemiskinan di pedesaan sebesar 1 persen, akan diikuti terjadinya peningkatan ketimpangan sebesar 0,16 persen.

Gambar 4.5.
Trend Kemiskinan dan Ketimpangan Perkotaan



Sumber: Hasil Analisis dengan PovcalNet

Tidak jauh berbeda dengan pedesaan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan perkotaan di Indonesia mempunyai arah yang tidak seiring. Tingkat kemiskinan pedesaan di Indonesia pada tahun 1990 sebesar 47,8 persen, turun menjadi 17,4 persen pada tahun 2011. Dari hasil analisis trend diperoleh persamaan : $Y = 46,54 - 2,81X$, yang dapat diartikan bahwa setiap tahun tingkat kemiskinan di perkotaan turun sebesar -2,81 persen. Dengan mengikuti trend tersebut, tingkat kemiskinan di perkotaan pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 14,5 persen, tahun 2013 sebesar 12 persen, dan tahun 2014 sebesar 9 persen.

Seperti juga di pedesaan, hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan mempunyai arah yang berkebalikan. Pada tahun 1990, ketimpangan di perkotaan sebesar 34,7 persen, mengalami kenaikan menjadi 42,1 persen pada tahun 2011. Hasil dari analisis trend linier diperoleh persamaan $Y = 34,43 + 0,40 X$, yang dapat diartikan setiap tahun terjadi kenaikan ketimpangan di perkotaan sebesar 0,40 persen.

Apabila kedua persamaan tersebut digabung, akan diperoleh elastisitas kemiskinan dan ketimpangan sebesar - 0,14 persen. Setiap penurunan kemiskinan di perkotaan sebesar 1 persen, akan diikuti peningkatan ketimpangan sebesar 0,14 persen.

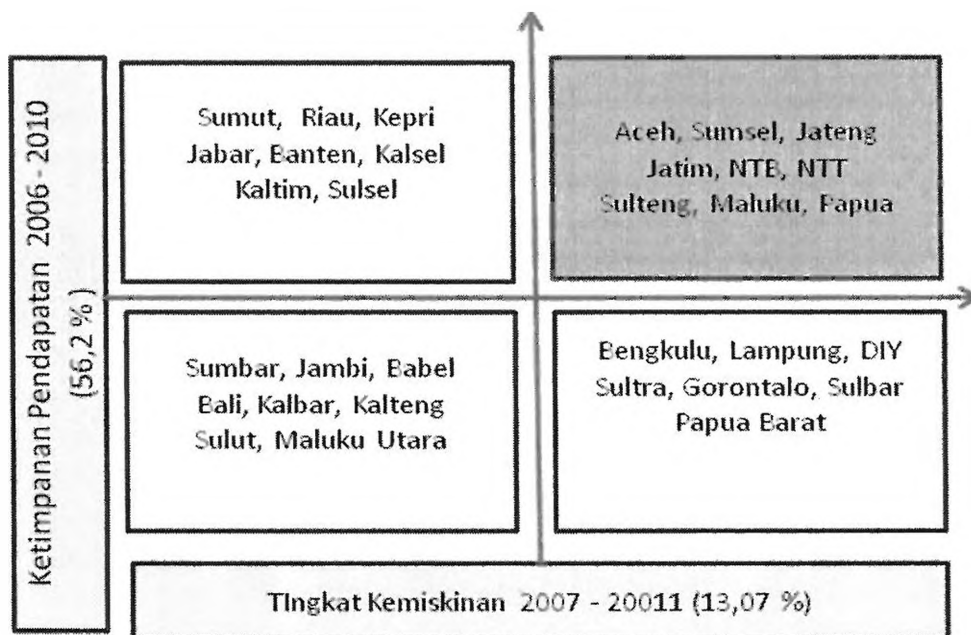
4.5. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Regional

Dengan memetakan kemiskinan dan ketimpangan propinsi kedalam diagram Kartesius, akan diperoleh 4 kuadran. Dari empat kuadran tersebut, yang perlu mendapat prioritas adalah propinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi, dan ketimpangan yang tinggi juga.

Dari data kemiskinan propinsi tahun 2007- 2011 dan hasil analisis ketimpangan pendapatan dengan menggunakan Indeks Wiliamson tahun 2006 – 2010, diperoleh hasil pada Gambar 4.6. dan Tabel 4.1. Propinsi yang masuk kategori kemiskinan tinggi dan ketimpangan tinggi adalah Propinsi Aceh, Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulteng, Maluku dan Papua.

Tingkat kemiskinan paling tinggi terjadi di Propinsi Papua mencapai 30,7 persen dengan tingkat ketimpangan 72,2 persen. Sementara itu, propinsi Jatim (108 %) mempunyai ketimpangan paling tinggi dengan tingkat kemiskinan sebesar 14,1 persen.

Gambar 4.6.
Kuadran Kemiskinan dan Ketimpangan



Sumber : BPS, Hasil Analisis

Tabel 4.1.
Propinsi dengan Kemiskinan dan Ketimpangan Tinggi

Propinsi	Kemiskinan	Ketimpangan
Aceh	18.8%	73.6%
Sumsel	13.8%	64.4%
Jateng	15.0%	73.9%
Jatim	14.1%	108.1%
NTB	18.8%	93.7%
NTT	20.1%	56.4%
Sulteng	16.0%	72.2%
Maluku	23.3%	67.6%
Papua	30.7%	72.2%
Rata-rata Nasional	13.1%	56.2%

Sumber: BPS, Hasil Analisis

4.6. Alternatif Kebijakan

Sebagaimana disebutkan dalam strategi pembangunan ekonomi pada RPJM 2004-2009, sasaran utama pembangunan adalah *pro growth*. Dengan percepatan pertumbuhan ekonomi akan makin banyak tercipta kesempatan kerja (*job*), sehingga semakin banyak keluarga Indonesia yang dapat dilepaskan dari perangkap kemiskinan (*poor*). Strategi ini terbukti berhasil, pertumbuhan ekonomi membaik, pengangguran berkurang, demikian juga kemiskinan. Namun demikian, strategi ini menyisakan sebuah PR besar. Ketimpangan selama kurun waktu tersebut semakin melebar.

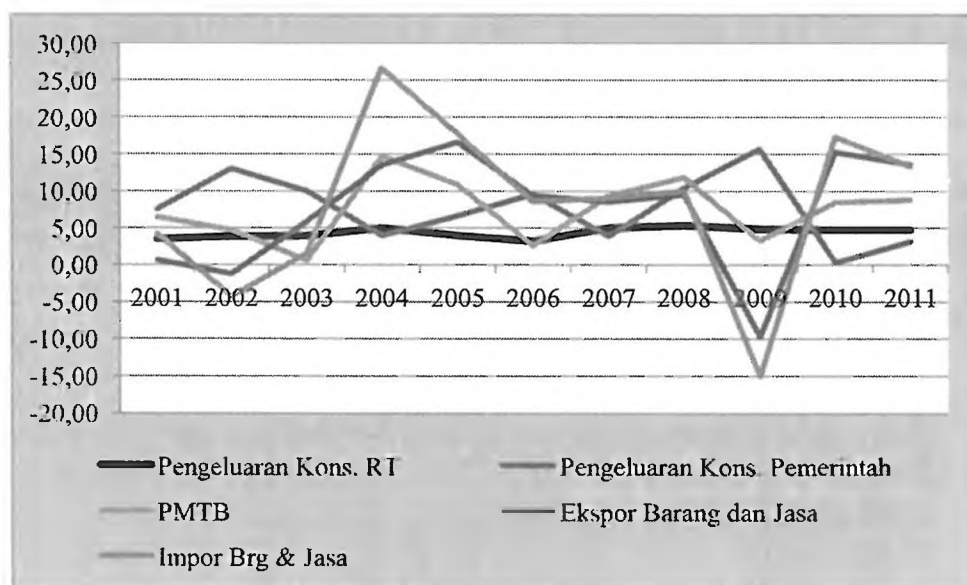
Agar tercapai pertumbuhan yang berkualitas (*inclusive growth*), pertumbuhan ekonomi harus diarahkan pada lapangan usaha dan sumber pengeluaran yang mampu menyerap tenaga kerja, dengan memperhatikan aspek regional dimana banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan dan ketimpangan.

Kemiskinan dan ketimpangan akan semakin memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Kesenjangan ini akan berdampak pada terjadinya, pemogokan buruh, tingginya tingkat kriminalitas, serta kerawanan sosial lainnya, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis secara regional pada kemiskinan dan ketimpangan menunjukkan trend tersebut. Propinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi, kecenderungan sering terjadi konflik sosial, seperti NTB, Sumsel, Sulteng, Maluku, dan Papua.

Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran pada periode 2001-2011, ekspor merupakan sumber yang paling labil (koef. Variasi 108 persen)⁴. Disisi lain, konsumsi rumah tangga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling stabil (koef. Variasi 16 persen). Kebijakan pemerintah selama ini cenderung lebih terkonsentrasi pada kebijakan investasi dan ekspor dengan memberikan berbagai fasilitas kemudahan (insentif). Disisi lain, ekspor dan investasi sangat rentan akan terjadinya *shock*. Terjadinya krisis tahun 2008-2009 memperlihatkan kondisi tersebut (Gambar 4.7.).

Sumber pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran perlu diarahkan pada konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga selain paling stabil juga rentan terhadap adanya gejolak eksternal. Kebijakan stabilitas harga dan pemberdayaan UMKM perlu mendapat prioritas untuk meningkatkan sumber pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga yang dapat selaras dengan penurunan angka kemiskinan dan mempersempit ketimpangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berkualitas.

Gambar 4.7.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2001-2011 (%)



Sumber : BPS

⁴ Koefisien variasi merupakan ratio standart deviasi terhadap nilai rata-rata yang diukur dalam persen. Rumus perhitungan adalah :

$$\text{Koefisien Variasi} = \text{Sd} / \text{X rata-rata} \times 100 \%$$

Tabel 4.2.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 2001-2011 (%)

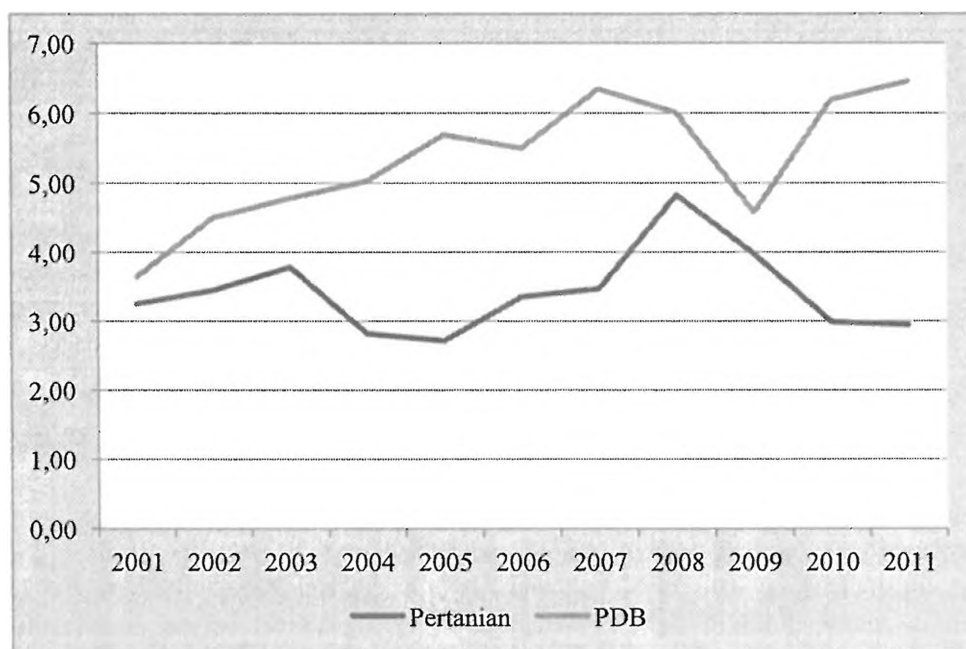
Sumber	Rata-rata	Standar deviasi	Koef. variasi
Kons. RT	4.36	0.71	16 %
Kons. Pemerintah	7.66	4.62	60 %
PMTB	7.43	4.32	58 %
Ekspor Barang Jasa	7.46	8.04	108 %
Impor Brg & Jasa	8.11	11.39	140 %
PDB	5.34	0.90	17 %

Sumber : BPS

Indonesia sebagai negara agraris, belum mampu memanfaatkan sumber potensi yang dimiliki. Sektor pertanian sebagai sektor primer/hulu untuk mendukung sektor-sektor sekunder dan tersier tumbuh lebih lambat dibanding sektor lainnya. Selama periode 2001-2011, rata-rata pertumbuhan sektor pertanian hanya mencapai 3,42 persen, dengan pertumbuhan yang lebih labil (koefisien variasisebesar 18 persen). Selama periode tersebut, pertumbuhan sektor pertanian selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Pada tahun 2010 dan 2011, kesenjangan pertumbuhan sektor pertanian dengan pertumbuhan PDB semakin melebar. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB pada tahun 2003 mampu mencapai 0,58 persen, terus mengalami penurunan. Pada tahun 2011, kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 0,39 persen.

Penduduk miskin yang sebagian besar berada di sektor pertanian, serta tenaga kerja yang juga sebagian besar terserap di sektor pertanian, perlu mendapat prioritas. Pertumbuhan pertanian akan mampu menekan tingkat kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 4.8.
Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pertumbuhan PDB 2001-2011 (%)



Tabel 4.3.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Sektoral 2001-2011 (%)

Sektor	Rata-rata	Standart deviasi	Koefisien Variasi
Pertanian	3.42	0.61	18 %
Sektor Lain	6.44	0.95	15 %
PDB	5.34	0.90	17 %

Alokasi belanja sektor pertanian yang telah naik cukup tinggi belum mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian secara optimal. Alokasi anggaran sector pertanian melalui Kementerian Pertanian yang pada tahun 2006 hanya sebesar Rp. 5,6 triliun, pada tahn 2011 meningkat menjadi Rp. 16,7 triliun, atau meningkat hampir 3 kali (298%). Sementara itu anggaran total kementerian hanya meningkat 2 kali lipat (228%) pada periode yang sama.

Tabel 4.4.
Alokasi Belanja Kementerian (Rp. Triliun)

Belanja Kementerian (Pusat)	LKPP 2005	LKPP 2006	LKPP 2007	LKPP 2008	LKPP 2009	Real 31 des 2010	APBN 2011
Pertanian	2.7	5.6	6.5	7.2	7.7	9	16.7
1.Total Bag Anggaran Kementerian	120.8	189.4	225	259.7	306.9	326.9	432.7
2.Total Bag Anggaran BUN	240.5	250.7	279.6	433.6	322	384.9	403.9
3. Total Belanja Pusat (1+2)	361.3	440.1	504.6	693.3	628.9	711.8	836.6
* Ratio Pertanian : Kementerian	2.2%	3.0%	2.9%	2.8%	2.5%	2.8%	3.9%
* Ratio Pertanian : Bel. Pusat	0.7%	1.3%	1.3%	1.0%	1.2%	1.3%	2.0%

Sumber : DJA

Demikian juga dengan belanja subsidi. Pada tahun 2006 alokasi subsidi pangan sebesar Rp. 8,6 triliun meningkat menjadi Rp. 31,8 triliun pada tahun 2011 (Tabel 4.5). Dari tabel tersebut, selama 5 tahun terakhir belanja subsidi pertanian meningkat menjadi hampir 3,7 kali lipat. Peningkatan alokasi anggaran Kementerian Pertanian serta peningkatan pada belanja subsidi pertanian, menunjukkan keseriusan pemerintah mendukung peningkatan produksi sektor pertanian.

Tabel 4.5.
Belanja Subsidi Pertanian (Rp. Triliun)

Belanja	LKPP 2005	LKPP 2006	LKPP 2007	LKPP 2008	LKPP 2009	Real 31 des 2010	APBN 2011
Belanja Subsidi Pertanian	9	8.6	13.4	28.3	32.9	35.78	31.8
- Pangan	6.4	5.3	6.6	12.1	13	15.2	15.3
- Pupuk	2.5	3.2	6.3	15.2	18.3	18.4	16.4
- Benih	0.1	0.1	0.5	1	1.6	2.18	0.1

Sumber : DJA

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Dari hasil bahasan sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Strategi pembangunan *pro growth*, *pro job* dan *pro poor* yang diprogramkan Pemerintah dalam RPJM 2004-2009 telah menunjukkan kinerja yang nyata. Pertumbuhan meningkat, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran juga menurun. Namun demikian, keberhasilan strategi pembangunan tersebut belum mampu diikuti ketimpangan pendapatan masyarakat.

2. Menurunannya angka kemiskinan belum sejalan dengan ketimpangan. Baik di pedesaan maupun perkotaan, angka kemiskinan menunjukkan trend yang menurun, namun ketimpangan mengalami kenaikan. Walaupun ketimpangan di pedesaan lebih rendah dari perkotaan, namun mempunyai trend yang lebih besar sehingga dalam jangka panjang ketimpangan di pedesaan akan menjadi lebih besar.
3. Prioritas pembangunan nasional perlu memperhatikan daerah/propinsi yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat ketimpangan tinggi, serta pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhan yang lambat. Daerah ini apabila tidak mendapat prioritas pembangunan akan berpotensi terjadinya kesenjangan sosial serta rawan konflik yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan.
4. Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yang paling stabil adalah dari konsumsi rumah tangga. Sumber ini seyogyanya tetap menjadi prioritas pertumbuhan, disamping pengembangan sumber lainnya. Sektor pertanian tumbuh melambat dibanding pertumbuhan PDB, kontribusi (*share*) sektor pertanian terhadap PDB semakin turun. Masyarakat miskin sebagian besar tinggal dan bekerja di sektor pertanian, apabila sektor pertanian tumbuh pesat akan mampu mengurangi kemiskinan khususnya di pedesaan.

5.2. Rekomendasi

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi ketimpangan di Indonesia, pembangunan ekonomi perlu memperhatikan aspek regional/wilayah. Perlu disusun skala prioritas dengan melakukan identifikasi propinsi-propinsi yang mempunyai skala prioritas prioritas tinggi. Skala prioritas berdasarkan propinsi adalah :

1. *Prioritas pertama*, propinsi yang mempunyai pertumbuhan rendah dan pendapatan per kapita rendah, serta kemiskinan tinggi dan ketimpangan tinggi yaitu Propinsi Aceh, Sumsel, Jateng, NTB, NTT dan Maluku.
2. *Prioritas kedua*, propinsi yang mempunyai kemiskinan tinggi dan ketimpangan tinggi yaitu Propinsi Aceh, Sumsel, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulteng, Maluku dan Papua.
3. *Prioritas ketiga*, propinsi yang mempunyai pertumbuhan rendah dan pendapatan per kapita rendah yaitu Aceh, Sumsel, Lampung, Babel, Jabar, Jateng, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, dan Maluku.

Sektor pertanian perlu mendapat skala prioritas tinggi mengingat kantong-kantong kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja di daerah sebagian besar berada pada sektor pertanian. Cepatnya pertumbuhan sektor industri dan jasa serta tingkat upah yang jauh melampaui sektor pertanian akan semakin

memperlebar ketimpangan. Perlu perbaikan upah sektor pertanian serta pemberian insentif fiskal bagi usaha yang bergerak di sektor pertanian.

Pada era desentralisasi fiskal, sesuai kewenangannya sektor pertanian telah dialihkan ke daerah. Kecenderungan belanja Kementerian Pertanian yang selalu bertambah dengan pertumbuhan melampaui kementerian lain, tidak sejalan dengan konsep *money follow function*. Besarnya anggaran subsidi pupuk bisa diarahkan untuk insentif pengadaan pupuk organik. Disisi lain, ketahanan pangan (dalam hal ini beras) menjadi permasalahan nasional (pusat). Kenaikan beras akan memberikan dampak yang besar terhadap inflasi nasional. Rencana pemerintah surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, perlu penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, BUMN serta Kementerian PU dalam menyediakan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Daftar Pustaka

- ADB, 2012, Outlook 2012, Confronting Rising Inequality in Asia
- BPS, 2007, Analisis Tipologi Kemiskinan Perkotaan, Studi Kasus di Jakarta Utara, BPS
- Catherine Barber, 2008, Notes on Poverty and Inequality, Oxfam International 2008.
- Emilia dan Imelia. 2006. Modul Ekonomi Regional. Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi. Jambi.
- Haughton J. & Khandker S., 2009, Hand book on Poverty + Inequality, World Bank, washington
- IMF, 2012, World Economic Outlook WEO), Growth Resuming Dangers Remain
- Manohar Sharma, 2011, Gabriela Inchauste, and Juan Feng "*Rising Inequality with High Growth and Falling Poverty*" www.worldbank.org/eapeye
- Martin Ravallion, 2005, A Poverty-Inequality Trade-off? World Bank Policy Research Working Paper 3579, April 2005
- PovcalNet (<http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm> diakses tanggal : 12 Mei 2012)
- Robinson Tarigan, 2005, Ekonomi Regional – Teori dan aplikasi, Bumi Aksara
- Robinson Tarigan, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara
- Sjafrizal 1997. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagaian Barat, Prisma LP3ES Jakarta
- Sjafrizal, 2008, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Praninta Offset, Padang
- <http://sukabumikab.bps.go.id/component/content/article/69-sosial/152-gini-ratio.html> (diakses 05 Juni 2012)

<http://www.bps.go.id> (diakses 07 Juli 2012)

<http://www.bappenas.go.id/node/165/3630/kemiskinan-di-indonesia-dan-penanggulangannya/> (diakses 15 Agustus 2012)

Tambunan, Tulus. 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama Hingga Pasca Krisis*. Pustaka Quantum, Jakarta.

<http://sukabumikab.bps.go.id/component/content/article/148-kemiskinan.html?start=1> (diakses 5 Februari 2012)

Quentin T. Wodon, 1999, *Growth, Poverty, and Inequality: A Regional Panel for Bangladesh*

LAMPIRAN

PDRB atas dasar harga konstan per kapita Indonesia (Rp. Triliun)

Propinsi	2006	2007	2008	2009	2010
Aceh	36.85	35.98	34.10	32.22	33.07
Sumatera Utara	93.35	99.79	106.17	111.56	118.64
Sumatera Barat	30.95	32.91	35.18	36.68	38.86
Riau	83.37	86.21	91.09	93.79	97.70
Jambi	13.36	14.28	15.30	16.27	17.47
Sumatera Selatan	52.21	55.26	58.07	60.45	63.74
Bengkulu	6.61	7.04	7.44	7.92	8.33
Lampung	30.86	32.69	34.44	36.22	38.31
Kep. Bangka Belitung	9.05	9.46	9.90	10.27	10.87
Kepulauan Riau	32.44	34.71	37.01	38.32	41.08
DKI Jakarta	312.83	332.97	353.72	371.47	395.66
Jawa Barat	257.50	274.18	291.21	303.41	321.88
Jawa Tengah	150.68	159.11	168.03	176.67	187.00
DI Yogyakarta	17.54	18.29	19.21	20.06	21.04
Jawa Timur	271.25	287.81	305.54	320.86	342.28
Banten	61.34	65.05	79.70	83.44	88.39
Bali	22.18	23.50	25.91	27.29	28.88
Nusa Tenggara Barat	15.60	16.37	16.83	18.87	20.06
Nusa Tenggara Timur	10.37	10.90	11.43	11.92	12.53
Kalimantan Barat	24.77	26.26	27.44	28.75	30.29
Kalimantan Tengah	14.85	15.75	16.73	17.65	18.79
Kalimantan Selatan	24.45	25.92	27.59	29.05	30.67
Kalimantan Timur	96.61	98.39	103.21	105.37	110.58
Sulawesi Utara	13.47	14.34	15.90	17.15	18.37
Sulawesi Tengah	12.67	13.68	15.05	16.18	17.44
Sulawesi Selatan	38.87	41.33	44.55	47.33	51.20
Sulawesi Tenggara	8.64	9.33	10.51	11.30	12.23
Gorontalo	2.18	2.34	2.52	2.71	2.92
Sulawesi Barat	3.32	3.57	4.00	4.24	4.74
Maluku	3.44	3.63	3.79	3.99	4.25
Maluku Utara	2.36	2.50	2.65	2.81	3.04
Papua Barat	5.55	5.93	6.40	6.85	8.69
Papua	18.40	19.20	18.93	23.24	22.62
Jumlah 33 Provinsi	1,777.95	1,878.72	1,999.54	2,094.32	2,221.60

Ketimpangan Perekonomian regional di Indonesia (Indeks Williamson)

Propinsi	2006	2007	2008	2009	2010
Aceh	1.00	0.75	0.71	0.64	0.58
Sumatera Utara	0.55	0.65	0.62	0.61	0.62
Sumatera Barat	0.39	0.38	0.38	0.38	0.41
Riau	0.74	0.68	0.67	0.65	0.78
Jambi	0.40	0.39	0.38	0.38	0.41
Sumatera Selatan	0.67	0.65	0.64	0.63	0.62
Bengkulu	0.43	0.41	0.47	0.43	0.42
Lampung	0.26	0.27	0.28	0.32	0.23
Kep. Bangka Belitung	0.31	0.31	0.32	0.31	0.29
Kepulauan Riau	0.98	0.62	0.64	0.62	0.53
DKI Jakarta **)					
Jawa Barat	0.68	0.68	0.68	0.68	0.62
Jawa Tengah	0.75	0.74	0.75	0.73	0.72
DI Yogyakarta	0.38	0.38	0.38	0.38	0.45
Jawa Timur	1.10	1.09	1.09	1.09	1.03
Banten	0.72	0.71	0.72	0.72	0.69
Bali	0.36	0.37	0.37	0.37	0.27
Nusa Tenggara Barat	0.93	0.95	0.90	0.92	0.99
Nusa Tenggara Timur	0.64	0.58	0.54	0.52	0.54
Kalimantan Barat	0.85	0.42	0.43	0.43	0.43
Kalimantan Tengah	0.24	0.23	0.21	0.21	0.19
Kalimantan Selatan	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69
Kalimantan Timur	1.08	1.03	1.04	1.00	0.94
Sulawesi Utara	0.50	0.56	0.48	0.46	0.51
Sulawesi Tengah	0.79	0.75	0.71	0.70	0.67
Sulawesi Selatan	0.71	0.71	0.72	0.69	0.70
Sulawesi Tenggara	0.49	0.49	0.47	0.43	0.42
Gorontalo	0.28	0.26	0.26	0.22	0.24
Sulawesi Barat	0.13	0.11	0.10	0.10	0.13
Maluku	0.66	0.79	0.71	0.62	0.60
Maluku Utara	0.27	0.27	0.30	0.30	0.23
Papua Barat	0.62	0.47	0.49	0.47	0.40
Papua	0.66	0.68	0.72	0.72	0.84

**) Propinsi DKI Jakarta tidak terdapat struktur ekonomi yang lebih rendah (Kab/kota), sehingga tidak dihitung nilai koefisiennya.

Ketimpangan Penmasyarakat di Indonesia (*Gini Ratio*)

Propinsi	2008	2009	2010
Aceh	0.27	0.29	0.30
Sumatera Utara	0.31	0.32	0.35
Sumatera Barat	0.29	0.30	0.33
Riau	0.31	0.33	0.33
Jambi	0.28	0.27	0.30
Sumatera Selatan	0.30	0.31	0.34
Bengkulu	0.33	0.30	0.37
Lampung	0.35	0.35	0.36
Kep. Bangka Belitung	0.26	0.29	0.30
Kepulauan Riau	0.30	0.29	0.29
DKI Jakarta	0.33	0.36	0.36
Jawa Barat	0.35	0.36	0.36
Jawa Tengah	0.31	0.32	0.34
DI Yogyakarta	0.36	0.38	0.41
Jawa Timur	0.33	0.33	0.34
Banten	0.34	0.37	0.42
Bali	0.30	0.31	0.37
Nusa Tenggara Barat	0.33	0.35	0.40
Nusa Tenggara Timur	0.34	0.36	0.38
Kalimantan Barat	0.31	0.32	0.37
Kalimantan Tengah	0.29	0.29	0.30
Kalimantan Selatan	0.33	0.35	0.37
Kalimantan Timur	0.34	0.38	0.37
Sulawesi Utara	0.28	0.31	0.37
Sulawesi Tengah	0.33	0.34	0.37
Sulawesi Selatan	0.36	0.39	0.40
Sulawesi Tenggara	0.33	0.36	0.42
Gorontalo	0.34	0.35	0.43
Sulawesi Barat	0.31	0.30	0.36
Maluku	0.31	0.31	0.33
Maluku Utara	0.33	0.33	0.34
Papua Barat	0.31	0.35	0.38
Papua	0.40	0.38	0.41

Tingkat Kemiskinan di Indonesia (Persen)

Propinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Aceh	26.65	23.53	21.80	20.98	19.57
Sumatera Utara	13.90	12.55	11.51	11.31	11.33
Sumatera Barat	11.90	10.67	9.54	9.50	9.04
Riau	11.20	10.63	9.48	8.65	8.47
Jambi	10.27	9.32	8.77	8.34	8.65
Sumatera Selatan	19.15	17.73	16.28	15.47	14.24
Bengkulu	22.13	20.64	18.59	18.30	17.50
Lampung	22.19	20.98	20.22	18.94	16.93
Kep. Bangka Belitung	9.54	8.58	7.46	6.51	5.75
Kepulauan Riau	10.30	9.18	8.27	8.05	7.40
DKI Jakarta	4.61	4.29	3.62	3.48	3.75
Jawa Barat	13.55	13.01	11.96	11.27	10.65
Jawa Tengah	20.43	19.23	17.72	16.56	15.76
DI Yogyakarta	18.99	18.32	17.23	16.83	16.08
Jawa Timur	19.98	18.51	16.68	15.26	14.23
Banten	9.07	8.15	7.64	7.16	6.32
Bali	6.63	6.17	5.13	4.88	4.20
Nusa Tenggara Barat	24.99	23.81	22.78	21.55	19.73
Nusa Tenggara Timur	27.51	25.65	23.31	23.03	21.23
Kalimantan Barat	12.91	11.07	9.30	9.02	8.60
Kalimantan Tengah	9.38	8.71	7.02	6.77	6.56
Kalimantan Selatan	7.01	6.48	5.12	5.21	5.29
Kalimantan Timur	11.04	9.51	7.73	7.66	6.77
Sulawesi Utara	11.42	10.10	9.79	9.10	8.51
Sulawesi Tengah	22.42	20.75	18.98	18.07	15.83
Sulawesi Selatan	14.11	13.34	12.31	11.60	10.29
Sulawesi Tenggara	21.33	19.53	18.93	17.05	14.56
Gorontalo	27.35	24.88	25.01	23.19	18.75
Sulawesi Barat	19.03	16.73	15.29	13.58	13.89
Maluku	31.14	29.66	28.23	27.74	23.00
Maluku Utara	11.97	11.28	10.36	9.42	9.18
Papua Barat	39.31	35.12	35.71	34.88	31.92
Papua	40.78	37.08	37.53	36.80	31.98